

Transformasi Digital, Stabilitas Politik-Ekonomi, dan Kompromi Kebijakan Pembangunan dalam Jalur Pertumbuhan Indonesia: Analisis Kualitatif

Digital Transformation, Political-Economic Stability, and Development Policy Trade-offs in Indonesia's Growth Pathway: A Qualitative Analysis

Titania Mukti¹, Sri Marlia², Ahyakudin³, Sujai⁴

titaniamukti@untirta.ac.id

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

⁴Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Info Article

| Submitted: 5 June 2026 | Revised: 22 June 2026 | Accepted: 1 July 2026

How to cite: Titania Mukti, etc., "Transformasi Digital, Stabilitas Politik-Ekonomi, dan Kompromi Kebijakan Pembangunan dalam Jalur Pertumbuhan Indonesia: Analisis Kualitatif", *Benefits : Journal of Economics and Tourism*, Vol. 3 No. 2, November, 2026, PP. 186-205.

ABSTRACT

Indonesia's economic growth during the 2020–2026 period reflects a post-pandemic recovery process supported by accelerated digital transformation and relative political stability. However, economic growth has remained at around 5 percent and has not yet reached higher long-term development targets. This study aims to analyze the role of digital transformation and political stability in shaping Indonesia's economic growth trajectory, identify the opportunities and challenges of digitalization, and evaluate the effectiveness of development policies implemented during the 2020–2026 period. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through documentary analysis and literature review from various sources, including government reports, policy documents, academic publications, and institutional datasets related to digital transformation, political stability, and economic development. The data were analyzed using thematic analysis through the stages of data reduction, categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that digital transformation contributes to improvements in productivity, economic efficiency, financial inclusion expansion, and MSME competitiveness. These impacts are reinforced by infrastructure development policies implemented primarily before 2025, including the construction of the National Capital City (IKN), roads, and dams, which strengthen regional connectivity and economic integration. Meanwhile, during the 2025–2026 period, the implementation of the Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) and the strengthening of the Red and White Cooperative (Koperasi Merah Putih) reflect a policy orientation toward inclusive development and grassroots economic empowerment, although they also increase fiscal financing requirements. From a macroeconomic perspective, rising fiscal commitments may influence market risk perceptions, reflected in exchange rate volatility of the Indonesian rupiah and fluctuations in capital market performance. Political stability remains a key determinant in maintaining investor confidence and ensuring policy continuity. The study concludes that the synergy between digital transformation, political stability, and development policy trade-offs constitutes a critical determinant of Indonesia's inclusive and sustainable growth trajectory.

Keyword: Digital transformation, political and economic stability, economic growth, Indonesia.

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020–2026 mencerminkan proses pemulihan pascapandemi COVID-19 yang didukung oleh percepatan transformasi digital dan stabilitas politik. Namun, laju pertumbuhan ekonomi masih berada pada kisaran 5 persen dan belum mencapai target pembangunan jangka panjang yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi digital dan stabilitas politik dalam membentuk jalur pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengidentifikasi peluang dan tantangan digitalisasi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan selama periode 2020–2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan



metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan telaah literatur dari berbagai sumber, meliputi laporan pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, serta data institusional terkait transformasi digital, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi ekonomi, perluasan inklusi keuangan, dan penguatan daya saing UMKM. Dampak tersebut diperkuat oleh kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan terutama pada periode sebelum 2025, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), jalan, dan bendungan, yang berperan dalam memperkuat konektivitas dan integrasi ekonomi antarwilayah. Sementara itu, pada periode 2025–2026, implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih mencerminkan orientasi kebijakan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan inklusi sosial-ekonomi, meskipun di sisi lain menimbulkan peningkatan kebutuhan pembiayaan fiskal. Dari perspektif makroekonomi, peningkatan komitmen fiskal tersebut berpotensi memengaruhi persepsi risiko pasar yang tercermin pada volatilitas nilai tukar rupiah dan dinamika pasar modal. Stabilitas politik tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan kebijakan pembangunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara transformasi digital, stabilitas politik, dan dinamika trade-off kebijakan pembangunan merupakan determinan penting dalam jalur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Transformasi digital, stabilitas ekonomi politik, pertumbuhan ekonomi, Indonesia*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif stabil dalam satu dekade terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,05% (BPS, 2025). Bahkan, sejak tahun 2014 hingga kuartal IV tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berada pada kisaran 5%, yang mengindikasikan adanya fenomena stagnasi pertumbuhan (Kemenkeu, 2025). Pola pertumbuhan moderat tersebut bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru, karena pemulihan pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi Indonesia pascakrisis sebelumnya juga berlangsung lebih cepat dibandingkan perbaikan pada kualitas kebijakan mikroekonomi dan kepastian iklim investasi (Hill, 2007).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi pascapandemi COVID-19, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan masih belum tercapai. Apabila stagnasi ini berlanjut dalam jangka panjang, dampaknya dapat menghambat peningkatan produktivitas nasional, menurunkan daya saing ekonomi dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, serta memperlambat peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang bertahan pada level moderat berpotensi menyulitkan Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*) dan mencapai target menjadi negara maju sebagaimana dicita-citakan dalam Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu,

diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia guna mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan yang dapat mendorong akselerasi ekonomi secara berkelanjutan.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai determinan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menganalisis pengaruh variabel-variabel ekonomi yang relevan dalam konteks stagnasi pertumbuhan selama satu dekade terakhir. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat global, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, diharapkan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dunia pada periode 2025–2026 (Abramova & Fituni, 2014). Namun demikian, berbagai tantangan eksternal masih membayangi perekonomian nasional, seperti ketegangan perdagangan global, kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap mitra dagangnya, perlambatan ekonomi dunia, serta ketidakpastian geopolitik yang berpotensi menghambat perdagangan dan investasi (Ing & Vadila, 2019). Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga dapat menekan perekonomian Indonesia melalui pelemahan permintaan eksternal dan harga komoditas, yang selanjutnya memengaruhi kinerja perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi domestik (Iqbal et al., 2022). Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat daya saing nasional melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan adopsi teknologi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Widyasanti, 2017).

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai efektif pada tahun 2025 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional (Sulaiman, 2025). Pada tahun 2026, berbagai program prioritas seperti hilirisasi industri, transformasi digital, penguatan ekonomi hijau, dan peningkatan investasi teknologi mulai menjadi fokus pembangunan nasional. Namun demikian, pencapaian target tersebut memerlukan dukungan berbagai faktor strategis, khususnya transformasi teknologi dan stabilitas politik sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Transformasi teknologi menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Digitalisasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI), Internet of Things (IoT), big data, cloud computing, dan teknologi finansial (FinTech) telah menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi global maupun nasional (Putri, 2021). Transformasi digital pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga membutuhkan

kapabilitas organisasi berupa manajemen inovasi, manajemen transformasi, keunggulan teknologi informasi, orientasi pelanggan, dan keunggulan operasional (Uhl et al., 2016). Peralihan menuju era Society 5.0 diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas nasional dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru (Rohayati & Abdillah, 2024). Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai kebijakan, termasuk pengembangan PIDI 4.0, perluasan infrastruktur digital, dan penguatan ekosistem ekonomi digital (Yim et al., 2023). Perkembangan ekosistem digital Indonesia dibangun melalui tahapan penguatan infrastruktur backbone TIK, liberalisasi layanan untuk mendorong peran swasta, serta dukungan layanan pada wilayah yang belum layak secara komersial (Kautsarina et al., 2017).

Berbagai studi menunjukkan bahwa transformasi teknologi berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi ekonomi, produktivitas usaha, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha (Narayan, 2020; Hamjen et al., 2022). Percepatan adopsi teknologi digital pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mencapai 60,5% turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi nasional (Sidabutar & Siswanto, 2024). Selain itu, penerapan teknologi rendah karbon seperti Carbon Capture and Storage (CCS) menjadi bagian dari upaya pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Yasin et al., 2021).

Meskipun demikian, transformasi teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan. Kesenjangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), rendahnya literasi digital, serta ketimpangan akses teknologi antarwilayah menyebabkan manfaat digitalisasi belum dirasakan secara merata (Farliana et al., 2024). Dampak transformasi teknologi juga menunjukkan variasi sektoral, di mana sektor industri manufaktur dan kendaraan bermotor memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan sektor pertanian dan pengolahan pangan (Yusuf, 2021). Selain itu, kompleksitas regulasi, lambatnya reformasi birokrasi, dan keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi hambatan dalam implementasi transformasi digital secara nasional (Wismansyah et al., 2024; Suhendra et al., 2025a).

Selain transformasi teknologi, stabilitas politik merupakan faktor fundamental yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Stabilitas politik menciptakan kepastian kebijakan, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi (Uddin et al., 2017). Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas politik memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan investasi, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ngandani, 2019). Pasca reformasi 1998, Indonesia berhasil mengembangkan sistem demokrasi yang relatif stabil dan

mampu menjaga pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi berbagai tantangan domestik maupun global (Shiraishi, 2014).

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kebebasan politik, kualitas kelembagaan, dan efektivitas tata kelola pemerintahan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan akumulasi modal (Nuzulman et al., 2023; Al-Fadhat & Nadhir, 2019). Namun demikian, tantangan seperti korupsi, birokrasi yang kompleks, dan inkonsistensi implementasi kebijakan masih menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sepenuhnya kondusif (Setiyono, 2014).

Meskipun hubungan antara transformasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi telah banyak diteliti, kajian yang mengintegrasikan aspek transformasi teknologi dan stabilitas politik dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Syabiansah (2024) menemukan bahwa digitalisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun penelitian tersebut belum mempertimbangkan peran stabilitas politik dalam mendukung efektivitas transformasi digital. Demikian pula, Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital melalui peningkatan penggunaan internet dan transaksi elektronik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi analisisnya masih terbatas pada indikator ekonomi digital. Sementara itu, Sidiq dan Indrajaya (2024) menganalisis pengaruh teknologi digital dan beberapa determinan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun belum memasukkan dimensi stabilitas politik dan dinamika transisi pemerintahan sebagai faktor penentu.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana transformasi teknologi dan stabilitas politik secara simultan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pada periode pascapandemi COVID-19 dan transisi pemerintahan tahun 2025–2026. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam satu kerangka analisis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi teknologi dan stabilitas politik berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020–2026. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dalam proses transformasi digital, serta mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam peran transformasi teknologi dan stabilitas politik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020–2026. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan statistik antarvariabel, melainkan menganalisis dan menginterpretasikan fenomena, kebijakan, serta dinamika pembangunan ekonomi yang berkembang dalam konteks tertentu.

Desain studi kasus digunakan karena Indonesia merupakan kasus yang relevan dan unik untuk diteliti. Selama periode 2020–2026, Indonesia menghadapi berbagai perubahan strategis, mulai dari pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, percepatan transformasi digital di berbagai sektor, hingga transisi pemerintahan yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan arah kebijakan pembangunan. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan kasus yang kompleks, di mana interaksi antara transformasi teknologi, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara mendalam dalam konteks nyata.

Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antarfenomena tersebut dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Pendekatan ini dinilai lebih tepat dibandingkan pendekatan kuantitatif yang cenderung berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel, karena penelitian ini bertujuan menjelaskan proses, dinamika, dan implikasi kebijakan yang membentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode penelitian.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan telaah literatur. Sumber data meliputi publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), World Bank, IMF, OECD, laporan industri digital, dokumen kebijakan pemerintah, artikel ilmiah nasional dan internasional, serta berbagai laporan yang relevan dengan transformasi teknologi, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, penelusuran literatur, dan analisis dokumen kebijakan. Sumber data penelitian meliputi publikasi resmi pemerintah, laporan lembaga nasional dan internasional, dokumen kebijakan, artikel ilmiah, serta data statistik yang berkaitan dengan transformasi teknologi, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yang

meliputi proses reduksi data, pengkodean, pengelompokan tema, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber data. Sebagai contoh, data mengenai pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dibandingkan dengan laporan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, maupun lembaga internasional seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF). Demikian pula, informasi mengenai transformasi teknologi dan stabilitas politik diverifikasi melalui perbandingan antara dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi lembaga terkait, dan temuan penelitian terdahulu. Proses triangulasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi informasi, mengurangi potensi bias dari satu sumber tertentu, serta meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian.

Fokus analisis penelitian mencakup: (1) perkembangan transformasi teknologi di Indonesia selama periode 2020–2026; (2) dinamika stabilitas politik dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi; (3) peluang dan tantangan transformasi digital terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; serta (4) efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan transformasi teknologi dan stabilitas politik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

A. Transformasi Teknologi sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hasil Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi teknologi telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Transformasi teknologi tidak hanya dipahami sebagai digitalisasi layanan, tetapi juga mencakup integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Internet of Things (IoT), big data, cloud computing, blockchain, serta berbagai teknologi industri 4.0 ke dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (Facin et al., 2022; Tebenko et al., 2024).

Literatur menunjukkan bahwa transformasi teknologi mampu meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas tenaga kerja, inovasi bisnis, serta menciptakan model ekonomi baru yang lebih adaptif terhadap perubahan global (Lo et al., 2024; Zarifis, 2023). Dalam konteks Indonesia, transformasi digital menjadi salah satu strategi menuju Visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan daya saing ekonomi nasional dan percepatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (Putri, 2021). Secara empiris, perkembangan digitalisasi Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet meningkat dari sekitar 73,7%

pada tahun 2020 menjadi 79,5% pada tahun 2024, dan terus meningkat hingga mencapai 81,72% pada tahun 2026, dengan jumlah pengguna lebih dari 235 juta penduduk (APJII, 2026). Sementara itu, data BPS menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang mengakses internet juga meningkat dari 69,21% pada 2023 menjadi 72,78% pada 2024 (BPS, 2025). Peningkatan ini mengindikasikan semakin luasnya integrasi teknologi digital dalam aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, transformasi digital juga tercermin dari pesatnya pertumbuhan ekonomi keuangan digital. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi pembayaran digital terus meningkat signifikan pada periode 2025–2026, yang ditopang oleh perluasan penggunaan QRIS, mobile banking, dan sistem pembayaran digital lintas platform. Pertumbuhan ini menunjukkan penguatan ekosistem ekonomi digital yang berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga dan sektor perdagangan elektronik. Selama periode 2020–2024, pemerintah telah mempercepat berbagai program digitalisasi nasional melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI 4.0), perluasan jaringan internet nasional, serta peningkatan layanan pemerintahan berbasis elektronik (Yim et al., 2023; Paramita et al., 2022). Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia yang menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor e-commerce, layanan keuangan digital, pendidikan digital, logistik, dan UMKM. Sidabutar dan Siswanto (2024) menunjukkan bahwa sekitar 60,5% UMKM telah mengadopsi teknologi digital dalam operasional bisnisnya, sehingga meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha. Bagi UMKM, transformasi digital tidak cukup dipahami sebagai penggunaan platform penjualan daring, melainkan juga sebagai perubahan proses bisnis dan strategi usaha agar digitalisasi mampu meningkatkan daya saing serta keberlanjutan ekonomi (Kurniawati et al., 2022).

Namun demikian, transformasi teknologi belum memberikan dampak yang merata pada seluruh sektor ekonomi. Yusuf (2021) menemukan bahwa sektor manufaktur berteknologi tinggi, mesin, dan kendaraan bermotor memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan sektor pertanian dan pengolahan pangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sektoral dalam proses transformasi digital nasional. Memasuki periode 2025–2026, perkembangan kecerdasan buatan generatif (Generative AI), otomatisasi industri, dan digitalisasi layanan publik semakin memperkuat posisi teknologi sebagai faktor strategis pembangunan ekonomi. Namun, efektivitas transformasi ini masih sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur digital, serta kemampuan adaptasi sektor usaha terhadap perubahan teknologi. Dengan

demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi teknologi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, manfaatnya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses digital antarwilayah, keterbatasan literasi digital, serta ketimpangan kapasitas teknologi antar sektor ekonomi. Di luar teknologi digital, transformasi teknologi pada sektor energi juga relevan bagi agenda pertumbuhan berkelanjutan karena pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi memerlukan kesiapan teknologi, investasi, serta konsistensi kebijakan jangka panjang (Sambodo et al., 2024).

B. Kesenjangan Digital sebagai Hambatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Meskipun transformasi digital berkembang pesat, hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Farliana et al. (2024) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kualitas infrastruktur TIK yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah-daerah di Pulau Jawa memiliki tingkat akses internet, kualitas jaringan, dan literasi digital yang lebih baik dibandingkan wilayah Indonesia Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital terjadi pada tiga dimensi utama:

1) Kesenjangan Infrastruktur

Masih terdapat wilayah dengan akses internet yang terbatas sehingga menghambat pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

2) Kesenjangan Literasi Digital

Transformasi teknologi menuntut kompetensi baru yang belum dimiliki secara merata oleh masyarakat dan pelaku usaha (Lukita et al., 2024).

3) Kesenjangan Ekonomi

Pelaku usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi modern dan perangkat digital yang memadai.

Selain perluasan akses, efektivitas digitalisasi usaha juga ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengonversi investasi dan sumber daya digital menjadi peningkatan efisiensi operasional, sehingga tingkat adopsi teknologi semata belum menjamin peningkatan kinerja ekonomi (Kyshakevych et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila kesenjangan digital tidak segera diatasi, maka transformasi teknologi justru berpotensi memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM digital dan pemerataan infrastruktur menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan transformasi

ekonomi nasional. Investasi teknologi perlu diarahkan tidak hanya untuk mengejar produktivitas, tetapi juga untuk memperluas manfaat pertumbuhan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan mengurangi risiko ketimpangan sosial-ekonomi (Widarni & Bawono, 2022).

C. Stabilitas Politik sebagai Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa stabilitas politik merupakan determinan penting dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penciptaan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta iklim investasi yang kondusif (Chletsos & Sintos, 2024; Uddin et al., 2017). Literatur komparatif menunjukkan bahwa negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi karena didukung oleh stabilitas politik yang kuat dan berkelanjutan (Lee, 2019). Dalam konteks Indonesia, stabilitas politik pasca-Reformasi berperan dalam memperkuat demokrasi, desentralisasi, dan tata kelola ekonomi yang lebih partisipatif (Shiraishi, 2014; Acharya, 2014). Konsolidasi demokrasi Indonesia ditandai oleh keberlangsungan pemilu yang kompetitif, rotasi kekuasaan yang damai, serta penguatan kebebasan sipil dan institusi politik, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kebijakan pembangunan ekonomi (Abdulkaki, 2008). Pada level kelembagaan, ketahanan partai politik dan proses pelembagaan demokrasi elektoral juga penting untuk menjaga persaingan politik tetap berlangsung dalam koridor yang dapat diprediksi dan mendukung stabilitas pemerintahan (Kristiyanto et al., 2023).r

Pada periode awal penelitian, yaitu tahun 2020, stabilitas politik dan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan berat akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi nasional sebesar sekitar -2% hingga -2,7% (Asmara et al., 2022; Suryahadi et al., 2020). Pemerintah merespons melalui kebijakan fiskal ekspansif dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga daya tahan ekonomi dan stabilitas sosial (Warburton, 2022; Anas et al., 2022). Pada periode 2021–2022, pemulihan ekonomi mulai terjadi seiring meningkatnya konsumsi domestik dan harga komoditas global, yang mendorong pertumbuhan kembali ke kisaran 5% (Anas et al., 2022; Pramono et al., 2017).

Memasuki tahun 2023–2024, stabilitas politik Indonesia relatif terjaga di tengah dinamika global seperti perang Ukraina, pengetatan suku bunga global, serta ketegangan perdagangan internasional (Anas et al., 2022; Indrawati et al., 2020). Pada periode ini, Indonesia juga menghadapi momentum politik penting berupa Pemilu 2024 yang secara umum berlangsung stabil, meskipun tetap menimbulkan ketidakpastian jangka pendek pada iklim investasi dan pasar keuangan. Dalam konteks ini, stabilitas politik tetap menjadi faktor penopang

utama arus investasi dan kepercayaan pasar (Nuzulman et al., 2023; Al-Fadhat & Nadhir, 2019).

Memasuki tahun 2025, dinamika stabilitas politik dan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh transisi pemerintahan menuju Presiden Prabowo Subianto yang membawa target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (Financial Times, 2025; Sulaiman, 2025). Pada periode ini, tantangan eksternal meningkat akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ketegangan tersebut meningkatkan risiko gangguan jalur energi global, terutama di kawasan strategis Selat Hormuz, sehingga menyebabkan volatilitas harga minyak dunia. Kondisi ini berdampak pada tekanan inflasi domestik, beban subsidi energi, serta peningkatan ketidakpastian fiskal Indonesia sebagai negara net importir energi (Chletsos & Sintos, 2024).

Secara domestik, periode 2025–2026 ditandai dengan implementasi program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih. Kedua program tersebut mencerminkan orientasi kebijakan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan inklusi sosial-ekonomi. Namun demikian, secara makroekonomi, program tersebut membutuhkan alokasi anggaran yang besar sehingga meningkatkan tekanan fiskal negara. Dalam kondisi tertentu, peningkatan belanja publik ini berpotensi mempersempit ruang fiskal dan memengaruhi persepsi risiko pasar terhadap keberlanjutan fiskal pemerintah.

Dalam periode yang sama, tekanan eksternal dan fiskal tersebut tercermin pada volatilitas nilai tukar rupiah yang sempat tertekan hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS, serta pelemahan pasar modal yang ditandai dengan fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kondisi ini menunjukkan meningkatnya sensitivitas pasar terhadap risiko global dan kebijakan domestik, yang sejalan dengan temuan bahwa stabilitas politik berpengaruh langsung terhadap kepercayaan investor dan dinamika pasar keuangan (Siska et al., 2023; Denie et al., 2024).

Selain itu, kebijakan pembangunan jangka panjang seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai pada era sebelumnya (pemerintahan Jokowi) tetap menjadi agenda strategis hingga periode 2025–2026. Namun, proyek tersebut memunculkan perdebatan akademik dan kebijakan terkait prioritas fiskal, efektivitas investasi publik, serta dampaknya terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah (Wismansyah et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara pembangunan jangka panjang berbasis infrastruktur besar dengan kebutuhan stabilitas fiskal jangka pendek.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa stabilitas politik Indonesia selama periode 2020–2026 bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal (pemilu, kebijakan fiskal, proyek strategis nasional) dan faktor eksternal (krisis pandemi, konflik geopolitik, serta volatilitas pasar global). Stabilitas politik tidak hanya berfungsi sebagai variabel institusional, tetapi juga sebagai determinan ekonomi yang memengaruhi investasi, nilai tukar, dan kinerja pasar keuangan, sehingga menjadi faktor kunci dalam menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

D. Stabilitas Politik dan Daya Tarik Investasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa stabilitas politik memiliki peran strategis dalam menentukan arus investasi domestik maupun asing melalui mekanisme kepastian kebijakan, stabilitas regulasi, dan penurunan risiko investasi. Bukti empiris pada sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa stabilitas politik berpengaruh positif terhadap daya tarik investasi asing langsung, sehingga penguatan kepastian politik tetap menjadi faktor strategis bagi Indonesia dalam mempertahankan minat investor (Priyadi et al., 2024). Al-Fadhat dan Nadhir (2019) menyatakan bahwa investor cenderung mengalokasikan modal pada negara dengan stabilitas politik yang tinggi karena menurunkan risiko sistemik dan meningkatkan expected return investasi. Dalam konteks ini, Woo dan Heo (2009) menegaskan bahwa korupsi, ketidakpastian regulasi, dan instabilitas politik merupakan faktor utama yang menurunkan daya tarik investasi asing langsung (FDI). Putantri et al. (2018) juga menunjukkan bahwa dinamika politik dan peristiwa kebijakan domestik dapat memengaruhi keputusan investor asing, khususnya melalui sensitivitas terhadap risiko institusional.

Secara empiris, periode 2020–2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu mempertahankan arus investasi di tengah tekanan pandemi dan ketidakpastian global, meskipun dengan volatilitas yang meningkat (Anas et al., 2022; Nuzulman et al., 2023). Namun, memasuki periode 2025–2026, penelitian ini menemukan adanya peningkatan sensitivitas pasar terhadap arah kebijakan fiskal dan struktural pemerintah. Dari sisi pasar keuangan, terdapat indikasi peningkatan volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang bergerak dalam tekanan akibat arus keluar modal asing (capital outflow) pada sektor tertentu. Kondisi ini diperkuat oleh fenomena penurunan bobot sejumlah saham Indonesia dalam indeks global seperti MSCI Emerging Markets Index, yang secara empiris sering dikaitkan dengan perubahan persepsi risiko investasi global terhadap suatu negara (Siska et al., 2023; Denie et al., 2024). Dalam beberapa periode, pelemahan nilai tukar rupiah hingga mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar AS juga

mencerminkan meningkatnya tekanan eksternal dan ketidakpastian kebijakan domestik.

Dari sisi kebijakan fiskal, periode 2025–2026 ditandai dengan ekspansi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih. Meskipun program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan inklusi sosial, secara makroekonomi kebijakan ini meningkatkan kebutuhan pembiayaan fiskal yang signifikan. Dalam teori stabilitas politik-ekonomi, peningkatan beban fiskal tanpa peningkatan penerimaan yang sepadan dapat meningkatkan sovereign risk dan menurunkan kepercayaan investor (Chletsos & Sintos, 2024; Uddin et al., 2017). Dalam konteks negara berkembang, stabilitas politik berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan, meskipun dampaknya terhadap volatilitas pertumbuhan tetap perlu dipahami secara kontekstual sesuai karakteristik ekonomi masing-masing negara (Ullah et al., 2024). Selain itu, kebijakan lanjutan seperti peningkatan royalti sektor tambang, penguatan kontrol ekspor komoditas, serta kebijakan industrialisasi hilir turut memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap predictability kebijakan ekonomi. Dalam literatur investasi, perubahan regulasi yang cepat dan intensif dapat meningkatkan policy uncertainty index, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan investasi portofolio dan FDI (Woo & Heo, 2009; Al-Fadhat & Nadhir, 2019).

Di sisi lain, proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi simbol transformasi struktural jangka panjang, namun juga menimbulkan diskursus terkait alokasi fiskal dan opportunity cost terhadap sektor produktif lain (Wismansyah et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara investasi infrastruktur jangka panjang dan stabilitas fiskal jangka pendek. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa stabilitas politik Indonesia pada periode 2020–2026 tidak hanya ditentukan oleh stabilitas institusional, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan fiskal, kredibilitas regulasi, serta persepsi risiko pasar global. Ketika terjadi peningkatan ketidakpastian kebijakan dan tekanan fiskal simultan dengan kondisi eksternal yang tidak stabil, maka dampaknya tercermin pada pelemahan pasar modal, tekanan nilai tukar, serta penurunan minat investasi asing.

E. Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020–2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami dinamika yang kompleks sepanjang periode 2020–2026, yang dipengaruhi oleh interaksi antara krisis global, pemulihan domestik, serta transformasi struktural ekonomi. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar sekitar -2,07% hingga -2,7% akibat pandemi Covid-19 yang

menekan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor (Asmara et al., 2022; Suryahadi et al., 2020). Dampak pandemi tidak hanya menekan konsumsi, investasi, dan perdagangan, tetapi juga memengaruhi sektor pertanian, keberlanjutan pembangunan, serta kerentanan kelompok masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi informal dan perdesaan (Edwards et al., 2022). Pada sektor pangan, pandemi memperlihatkan pentingnya menjaga kelancaran rantai pasok, stabilitas harga, dukungan bagi produsen pertanian, dan diversifikasi pangan sebagai bagian dari ketahanan ekonomi nasional (Rozaki, 2020). Pada periode yang sama, pemerintah merespons melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp677 triliun untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat (Warburton, 2022).

Memasuki tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sekitar 3,7%–5,0%, yang ditopang oleh meningkatnya konsumsi domestik, perbaikan mobilitas masyarakat, serta kenaikan harga komoditas ekspor (Anas et al., 2022). Inflasi masih relatif terkendali pada kisaran 1,9%–3,5%, sementara investasi mulai pulih seiring dengan membaiknya sentimen global. Pada tingkat sektoral, pemulihan pascapandemi juga menuntut kemampuan adaptasi pelaku usaha, termasuk pelaku industri pariwisata, melalui penyesuaian layanan, strategi operasional, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan usaha (Kristiana et al., 2021). Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi sekitar 5,3% didorong oleh kuatnya ekspor berbasis komoditas, peningkatan investasi infrastruktur, serta ekspansi belanja pemerintah (Nyoman Suluh Wijaya et al., 2024). Pada periode ini, arus Penanaman Modal Asing (PMA) juga kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi global dan stabilitas makroekonomi domestik (Anas et al., 2022).

Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pola pertumbuhan yang relatif stabil pada kisaran 5,0%–5,1% (BPS, 2025; Kemenkeu, 2025). Meskipun stabil, kondisi ini mencerminkan fenomena “middle-income growth trap” atau stagnasi pertumbuhan jangka menengah, di mana Indonesia belum mampu keluar dari kisaran pertumbuhan moderat selama hampir satu dekade. Pada periode ini, inflasi berada dalam rentang terkendali (sekitar 2%–3%), namun tekanan eksternal meningkat akibat pengetatan suku bunga global, ketegangan geopolitik, serta pelemahan perdagangan internasional (Anas et al., 2022; Indrawati et al., 2020).

Dari sisi pasar keuangan, periode 2023–2024 juga ditandai dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang berada pada kisaran Rp15.000–Rp16.500 per dolar AS, serta volatilitas pasar modal akibat perubahan arus modal global dan ketidakpastian kebijakan moneter negara maju. Dalam periode ini, Indonesia tetap mampu

menjaga stabilitas pertumbuhan, namun dengan ruang fiskal yang semakin terbatas akibat peningkatan belanja negara dan subsidi energi.

Memasuki tahun 2025–2026, dinamika ekonomi Indonesia semakin dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang lebih kompleks, termasuk perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi rantai pasok global, serta eskalasi konflik geopolitik yang berdampak pada volatilitas harga energi dan pangan. Tekanan ini berimplikasi pada meningkatnya risiko inflasi impor dan pelemahan nilai tukar rupiah yang dalam beberapa periode mendekati Rp17.500–Rp18.000 per dolar AS, terutama pada kondisi peningkatan outflow modal asing dan penyesuaian portofolio investor global. Di sisi lain, Indonesia juga memperoleh peluang strategis dari bonus demografi, percepatan digitalisasi ekonomi, serta hilirisasi industri. Sektor ekonomi digital terus berkembang dengan kontribusi yang meningkat terhadap PDB nasional, seiring dengan ekspansi e-commerce, fintech, dan layanan digital publik. Namun demikian, ketimpangan digital antarwilayah masih menjadi tantangan utama yang membatasi dampak optimal transformasi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi (Farliana et al., 2024; Sidabutar & Siswanto, 2024). Selain itu, kebijakan pembangunan pada periode ini juga diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan transformasi struktural melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih. Program ini memperluas intervensi fiskal pemerintah pada sektor sosial-ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan tekanan pada belanja negara dan mempersempit ruang fiskal untuk investasi produktif jangka panjang.

Secara simultan, stabilitas politik tetap menjadi variabel kunci dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Nuzulman et al. (2023) menegaskan bahwa stabilitas politik berkontribusi terhadap peningkatan investasi dan akumulasi modal. Namun, dalam konteks 2025–2026, efektivitas stabilitas politik sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan fiskal, kredibilitas regulasi, serta kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara agenda pembangunan jangka panjang dan stabilitas makroekonomi jangka pendek. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2020–2026 berada dalam fase transisi struktural, di mana transformasi teknologi dan stabilitas politik berperan sebagai dua pilar utama, namun masih dibatasi oleh tantangan eksternal global, ketimpangan struktural, serta tekanan fiskal domestik.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5% selama periode 2020–2026 tidak semata-mata

dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas transformasi teknologi dan kualitas stabilitas politik. Transformasi teknologi terbukti menjadi penggerak pertumbuhan baru melalui digitalisasi ekonomi, namun masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital, literasi teknologi, dan ketimpangan sektoral. Sementara itu, stabilitas politik berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan investasi, inovasi, dan implementasi kebijakan ekonomi berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% memerlukan sinergi antara percepatan transformasi teknologi yang inklusif dan penguatan stabilitas politik yang berkelanjutan.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data runtut waktu (time series) atau panel data guna menguji secara empiris hubungan kausal antara transformasi digital, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini penting untuk memperkuat temuan kualitatif yang telah diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan variabel dengan memasukkan indikator lain seperti inflasi, nilai tukar, investasi asing langsung (FDI), serta indeks digitalisasi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan pertumbuhan ekonomi.

Studi komparatif antar negara berkembang di kawasan Asia Tenggara juga direkomendasikan untuk melihat perbedaan efektivitas kebijakan transformasi digital dan stabilitas politik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penelitian di masa depan dapat secara lebih spesifik mengkaji dampak kebijakan tertentu seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta proyek infrastruktur strategis terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas makroekonomi, sehingga diperoleh evaluasi kebijakan yang lebih mendalam dan terukur. Terakhir, kajian lanjutan juga dapat mengeksplorasi dimensi tata kelola pemerintahan (governance quality) dan kesiapan institusi dalam mendukung transformasi digital agar dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdulkali, L. (2008). *Democratisation in Indonesia: From transition to consolidation*. Asian Journal of Political Science, 16(2). <https://doi.org/10.1080/02185370802204099>
- Acharya, A. (2014). *Indonesia matters: Asia's emerging democratic power*. World Scientific. <https://doi.org/10.1142/9298>
- Al-Fadhat, F., & Nadhir, M. R. (2019). Foreign investment and the political economy of Indonesian capital market in 2015–2016. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(6). <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7659>

- Anas, T., Hill, H., Narjoko, D., & Putra, C. T. (2022). The Indonesian economy in turbulent times. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(3). <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2133344>
- Asmara, T., Arimuladi, S. U., & Utama, Y. J. (2022). Investment dynamics in the emerging market: COVID-19 influence. *Journal of Governance and Regulation*, 11(4). <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4art9>
- BPS. (2025). *Ekonomi Indonesia 2024 dan indikator pertumbuhan ekonomi*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Chletsos, M., & Sintos, A. (2024). Political stability and financial development: An empirical investigation. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 94. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2024.02.003>
- Denie, J., Surachman, Indrawati, N. K., & Rahayu, M. (2024). Nexus between oil, gold price and DXY index on Indonesian stock market during geopolitical events (2022–2024). *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(6). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-142>
- Edwards, R., Halimatussadiyah, A., Moeis, F. R., & Maulia, R. F. (2022). Agriculture, development and sustainability in the Covid-19 era. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(1). <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2056935>
- Farliana, N., Murniawaty, I., & Hardianto, H. (2024). Sustainability of the digital economy in Indonesia: Opportunities, challenges and future development. *Review of Business and Economics Studies*, 11(4). <https://doi.org/10.26794/2308-944x-2023-11-4-21-28>
- Facin, A. L. F., et al. (2022). Featured topics in research on digital transformation. *Revista de Administração de Empresas*, 62(6). <https://doi.org/10.1590/s0034-759020220602x>
- Hamjen, H., Rumata, V. M., Damanik, M. P., & Sastrobroto, A. S. (2022). Understanding digital transformation: The Indonesian MSME perspective. In *Handbook of Research on AI and Knowledge Management in Asia's Digital Economy*.
- Hill, H. (2007). The Indonesian economy: Growth, crisis and recovery. *Singapore Economic Review*, 52(2). <https://doi.org/10.1142/S0217590807002610>
- Indrawati, S. M., Diop, N., Ikhsan, M., & Kacaribu, F. (2020). Enhancing resilience to turbulent global financial markets: An Indonesian experience. *Economics and Finance in Indonesia*, 66(1). <https://doi.org/10.47291/efi.v66i1.683>
- Ing, L. Y., & Vadila, Y. (2019). U.S.–China trade tensions on Indonesia's trade and investment. *Asian Economic Papers*, 18(3). https://doi.org/10.1162/asep_a_00726
- Iqbal, M., Elianda, Y., Akbar, A., & Nurhadiyanti. (2022). USA–China trade war: Economic impact on Indonesia. *Journal of Public Affairs*, 22(3). <https://doi.org/10.1002/pa.2543>

- Kemenkeu. (2025). *Ekonomi Indonesia diproyeksi kembali tumbuh 5%*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kristiana, Y., Pramono, R., & Brian, R. (2021). Adaptation strategy of tourism industry stakeholders during COVID-19 pandemic. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0213>
- Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*, 9(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Kurniawati, E., Kohar, U. H. A., & Pirzada, K. (2022). Digital transformation of Indonesian MSMEs. *Polish Journal of Management Studies*, 26(2). <https://doi.org/10.17512/pjms.2022.26.2.15>
- Kyshakevych, B., et al. (2024). Digitalization efficiency in SMEs. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 3(56). <https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.56.2024.4344>
- Lee, Y. S. (2019). Political governance, law, and economic development. *Law and Development Review*, 12(3). <https://doi.org/10.1515/ldr-2019-0039>
- Lo, M. G. Y., et al. (2024). Digital transformation and environmental impacts in Indonesia. *One Earth*, 7(11). <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.10.010>
- Lukita, C., et al. (2024). Digital transformation and HR competency. *ICCIT 2024 Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/ICCIT62134.2024.10701105>
- Narayan, S. W. (2020). Fintech and economic growth in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 22(4). <https://doi.org/10.21098/bemp.v22i4.1237>
- Nuzulman, N., Masbar, R., Nazamuddin, B. S., & Majid, M. S. A. (2023). Democracy and economic growth in Indonesia. *Ikonomicheski Izsledvania*, 32(7).
- Nyoman Suluh Wijaya, I., et al. (2024). Infrastructure development and economic recovery in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1310(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1310/1/012009>
- Paramita, A. S., et al. (2022). E-Govchurch as digital transformation initiative. *ICTIIA 2022 Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/ICTIIA54654.2022.9935850>
- Pramono, B., et al. (2017). Monetary and banking outlook Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 19(4). <https://doi.org/10.21098/bemp.v19i4.692>
- Priyadi, U., Susantun, I., & Shidique, J. S. A. (2024). Policy quality and FDI in ASEAN. *Journal of Ecohumanism*, 3(6), 1561–1572. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i6.4104>

- Putri, N. M. A. W. (2021). Digital transformation and Society 5.0 in Indonesia. *IC-ICTRuDev 2021 Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/IC-ICTRuDev50538.2021.9656528>
- Rohayati, Y., & Abdillah, A. (2024). Society 5.0 and digital transformation Indonesia. *Societies*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/soc14120266>
- Rozaki, Z. (2020). COVID-19 and food security in Indonesia. *Reviews in Agricultural Science*. https://doi.org/10.7831/ras.8.0_243
- Sambodo, M. T., et al. (2024). Energy sector transformation Indonesia. *Heliyon*, 10(6). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27645>
- Setiawan, A. B., et al. (2017). ICT industry development Indonesia. *AJTDE*, 5(3). <https://doi.org/10.18080/ajtde.v5n3.96>
- Setiyono, B. (2014). Governance reform and corruption Indonesia. In *Corruption, Good Governance and Economic Development*. https://doi.org/10.1142/9789814612593_0011
- Shiraishi, T. (2014). Indonesian technocracy in transition. *Southeast Asian Studies*, 3(2).
- Siska, E., Duraipandi, O., & Widodo, P. (2023). Stock market development Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 20(4). [https://doi.org/10.21511/imfi.20\(4\).2023.07](https://doi.org/10.21511/imfi.20(4).2023.07)
- Sidabutar, A., & Siswanto, J. (2024). Digital transformation in SMEs Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 484. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448401017>
- Suhendra, I., et al. (2025a). Digital economy and growth Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2457477>
- Sulaiman, S. (2025). Indonesia economy expands 5% in 2024. *Reuters*.
- Suryahadi, A., et al. (2020). Covid-19 impact on poverty Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Tebenko, V., et al. (2024). Digital transformation in business. *Economic Affairs*, 69, 307–315. <https://doi.org/10.46852/0424-2513.1.2024.32>
- Uddin, M. A., Ali, M. H., & Masih, M. (2017). Political stability and growth. *Economic Modelling*, 64. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.04.042>
- Uhl, A., et al. (2016). Digital capability framework. In *Digital Enterprise Transformation*. <https://doi.org/10.4324/9781315577166>
- Ullah, W., et al. (2024). Political instability and financial development. *Theoretical and Practical Research in Economic Fields*, 15(2).
- Warburton, E. (2022). Indonesia in 2021: Crisis and recovery. *Asian Survey*, 62(1). <https://doi.org/10.1525/as.2022.62.1.09>
- Widarni, E. L., & Bawono, S. (2022). Technology investment and growth Indonesia. In *Modeling Economic Growth in Indonesia*.

- Wismansyah, A. R., et al. (2024). Structural transformation Indonesia. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(5). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i5.3773>
- Woo, J. Y., & Heo, U. (2009). Corruption and FDI in Asia. *Asian Politics & Policy*, 1(2). <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01113.x>
- Yasin, C. M., et al. (2021). Coal downstream policy Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 882(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/882/1/012083>
- Yim, D. S., et al. (2023). Digital transformation Indonesia PIDI 4.0. *PICMET 2023 Proceedings*. <https://doi.org/10.23919/PICMET59654.2023.10216890>
- Yusuf, A. A. (2021). Industry 4.0 impact Indonesia economy. *Regional Science Policy & Practice*, 13(6). <https://doi.org/10.1111/rsp3.12463>
- Zarifis, A. (2023). Business digital transformation cases. *Books with Buzz*.